

EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG (STUDI KASUS DESA HARUS DAN DESA TANTARINGIN)

Nida Marhamah¹, Agus Sya'bani Arlan², Ramona Handayani³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: nidamarhamah5@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil pengamatan terkait evaluasi penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, dengan studi kasus Desa Harus dan Desa Tantaringin, ditemukan bahwa di Desa Harus terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut mencakup: 1) jaringan internet yang belum stabil, 2) ketergantungan hanya pada satu operator, dan 3) pelatihan aplikasi yang sering kali hanya dilakukan sekali. Sementara itu, untuk Desa Tantaringin, latar belakang permasalahannya meliputi: 1) koneksi internet yang tidak stabil, 2) aplikasi sering mengalami gangguan teknis, dan 3) kurangnya pendampingan teknis lanjutan dalam penggunaan aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Siskeudes di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan metode purposive sampling yang melibatkan sembilan responden. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Harus dan Tantaringin termasuk kategori cukup baik. Hal ini dianalisis berdasarkan empat aspek evaluasi: Context Evaluation: Indikator kekuatan penerapan dinilai baik karena aplikasi Siskeudes memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, kelemahan penerapan terlihat pada seringnya terjadi gangguan teknis seperti error dan lambatnya respons sistem. Input Evaluation: Indikator sumber daya manusia di kedua desa cukup baik, dengan perangkat desa memiliki pemahaman dasar tentang aplikasi. Fasilitas dan sarana pendukung juga memadai. Process Evaluation: Kegiatan yang dilakukan dinilai efektif karena berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Penanggung jawab aplikasi telah menjalankan perannya dengan baik. Namun, waktu penerapan di Desa Harus masih perlu ditingkatkan. Product Evaluation: Penilaian terhadap kebijakan dan keberhasilan implementasi aplikasi tergolong cukup baik. Faktor-faktor yang memengaruhi evaluasi ini meliputi pendorong seperti kemampuan pengguna dan kepatuhan pada transparansi serta akuntabilitas. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat seperti masalah teknis pada aplikasi dan keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi yang belum menjadi prioritas.

Kata Kunci : Evaluasi, Penerapan, Keuangan

ABSTRACT

Based on the results of observations related to the evaluation of the implementation of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Muara Harus District, Tabalong Regency, with a case study of Harus Village and Tantaringin Village, it was found that there were several problems in Harus Village. These problems include: 1) an unstable internet network, 2) dependence on only one operator, and 3) application training that is often only carried out once. Meanwhile, for Tantaringin Village, the background of the problems includes: 1) an unstable internet connection, 2) the application often experiences technical problems, and 3) lack of further technical assistance in using the application. This study aims to evaluate the implementation of Siskeudes in Muara Harus District, Tabalong Regency, and identify the factors that influence it. The approach used is qualitative with a descriptive research type. Data collection techniques involve interviews, observations, and documentation, with a purposive sampling method involving nine respondents. The data obtained are analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Siskeudes application in Harus and Tantaringin Villages is included in the fairly good category. This is analyzed based on four evaluation aspects: Context Evaluation: The implementation strength indicator is considered good because the Siskeudes application provides significant benefits in village financial management. However, the weakness of the implementation is seen in the frequent occurrence of technical disruptions such as errors and

slow system responses. Input Evaluation: The human resource indicator in both villages is quite good, with village officials having a basic understanding of the application. Supporting facilities and infrastructure are also adequate. Process Evaluation: The activities carried out are considered effective because they have succeeded in increasing the efficiency of financial management. The person in charge of the application has carried out his role well. However, the implementation time in Harus Village still needs to be improved. Product Evaluation: The assessment of the policy and success of the application implementation is quite good. Factors that influence this evaluation include drivers such as user capabilities and compliance with transparency and accountability. On the other hand, there are inhibiting factors such as technical problems with the application and limitations in the implementation of evaluations that have not been prioritized.

Keywords: *Evaluation, Implementation, Finance*

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun desa. Salah satu perubahan signifikan di tingkat desa adalah penerapan otonomi desa. Otonomi desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan desa demi tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Upaya mencapai kesejahteraan ini dapat dilakukan melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dari rangkaian proses pembangunan desa yang mencakup tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa diharapkan mampu memahami dan melaksanakan proses ini dengan baik. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang terdiri dari aparatur desa, termasuk bendahara desa, berdasarkan keputusan kepala desa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangannya serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini bertujuan menciptakan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk mendukung implementasi ini, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Sejak 2015, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP dengan Nomor 900/6271/SJ dan MoU16/D4/2015, yang ditandatangani pada 6 November 2015. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa melalui sistem yang terintegrasi.

Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes, pemerintah desa menyusun laporan keuangan secara manual. Namun, cara manual ini dinilai kurang efisien dalam proses pembuatan laporan. Kehadiran aplikasi Siskeudes memberikan solusi yang dirasakan sangat membantu karena penggunaannya lebih praktis dan efektif dibandingkan metode manual. Meski demikian, penerapan aplikasi ini membutuhkan perangkat keras seperti komputer dan koneksi internet untuk mendukung kelancaran operasionalnya.

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Tabalong baru dimulai pada tahun 2018. Kabupaten Tabalong terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dan terdiri dari 12 kecamatan. Salah satu kecamatan yang mengimplementasikan aplikasi ini adalah Kecamatan Muara Harus, yang memiliki 7 desa: Harus, Madang, Manduin, Mantuil, Tantarangin, Padangin, dan Murung Karangan.

Pemerintah melalui BPKP mengupayakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan tertib. Ini berarti, pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat sesuai dengan kondisi anggaran yang sebenarnya di lapangan. Meski demikian, penerapan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Muara Harus, khususnya di

Desa Harus dan Desa Tantaringin, masih menghadapi beberapa kendala, yaitu:

1. Desa Harus
 - a. Koneksi internet yang tidak stabil kerap menghambat proses input dan pelaporan keuangan melalui aplikasi Siskeudes. Pegawai desa harus menunggu jaringan internet stabil untuk melanjutkan pengelolaan data, sehingga aktivitas keuangan sering kali tertunda.
 - b. Pengelolaan sistem keuangan di Desa Harus hanya bergantung pada satu operator. Ketidakhadiran atau kendala yang dihadapi operator tersebut dapat menyebabkan tertundanya proses penyusunan laporan dan pengambilan keputusan terkait keuangan desa.
 - c. Pelatihan yang diberikan untuk penggunaan aplikasi ini umumnya hanya dilakukan sekali tanpa ada pendampingan lanjutan. Akibatnya, perangkat desa sering kesulitan menghadapi masalah teknis.
2. Desa Tantaringin
 - a. Koneksi internet yang tidak stabil menyebabkan perangkat desa sering menggunakan aplikasi Siskeudes dalam mode offline. Hal ini menyebabkan sinkronisasi data dengan sistem pusat tertunda, sehingga pelaporan keuangan menjadi terlambat.
 - b. Aplikasi Siskeudes kerap mengalami gangguan teknis seperti tidak bisa diakses atau lambat saat proses input data. Kondisi ini menghambat penyelesaian tugas tepat waktu, terutama menjelang batas akhir pelaporan.
 - c. Setelah pelatihan awal, pendampingan teknis lanjutan untuk aparatur desa tidak diberikan secara berkelanjutan. Akibatnya, perangkat desa mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan teknis yang muncul selama penggunaan aplikasi.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada Mei 2015 dan mulai diterapkan di desa-desa pada tahun 2016. Namun, implementasi awalnya menghadapi berbagai tantangan, khususnya di Desa Harus dan Desa Tantaringin, yang baru mulai mengadopsi aplikasi ini pada tahun 2018.

Tujuan utama dari penerapan Siskeudes adalah membantu aparatur pemerintah desa dalam mempermudah proses perencanaan dan pelaporan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan efektif. Meski demikian, ada berbagai aspek dalam penerapan aplikasi ini yang masih memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Evaluasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, *evaluation*. Evaluasi merupakan sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, atau menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Proses ini dapat dilakukan pada berbagai tingkat, seperti individu, kelompok, organisasi, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, evaluasi melibatkan pengamatan dan investigasi untuk menilai efektivitas suatu program, mengidentifikasi kontribusi program terhadap perubahan, serta menentukan kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan, atau pengembangan lebih lanjut.

Dalam konteks evaluasi sistem informasi, proses ini bertujuan untuk memahami sejauh mana implementasi sistem informasi berjalan efektif. Evaluasi ini mencakup perspektif dari pengguna, organisasi, serta teknologi yang digunakan dalam sistem informasi tersebut.

Evaluasi juga digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah berhasil dilaksanakan. Biasanya, evaluasi dilakukan setelah kebijakan berjalan dalam jangka waktu tertentu yang memadai, meskipun tidak ada batasan waktu pasti kapan evaluasi harus dilakukan.

Menurut Dunn, sebagaimana dijelaskan oleh Dewi (2016:200), evaluasi memiliki makna serupa dengan *appraisal* (penaksiran), *rating* (pemberian angka), dan *assessment* (penilaian). Evaluasi adalah upaya untuk menganalisis hasil kebijakan dengan memberikan nilai berdasarkan informasi yang dihasilkan. Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi bertujuan menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil suatu kebijakan.

Wirawan (2011), yang dikutip dalam Assyahri dan Vaguita (2019), menjelaskan bahwa evaluasi adalah penelitian untuk menganalisis dan menilai sesuatu dengan membandingkannya menggunakan indikator evaluasi yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk

mendukung pengambilan keputusan terkait objek evaluasi tersebut.

Menurut Reno Affrian (2023:77-81), evaluasi berdasarkan objeknya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan merupakan rencana induk yang disusun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri, yang berlaku dalam jangka waktu tak terbatas hingga kebijakan tersebut dicabut atau digantikan oleh kebijakan baru. Sebagai contoh, undang-undang dan peraturan pemerintah berlaku terus menerus sampai ada perubahan. Implementasi kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai semua aktivitas terkait kebijakan tersebut.

2. Evaluasi Program

Program adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi hasil evaluasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program tersebut. Evaluasi program bisa dibagi menjadi evaluasi masukan (input evaluation), evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation), dan evaluasi dampak (impact evaluation).

3. Evaluasi Proyek

Proyek adalah kegiatan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung implementasi program. Jangka waktu proyek bisa bervariasi mulai dari beberapa tahun hingga beberapa bulan, minggu, atau bahkan hari. Contohnya, untuk mengembangkan program pendidikan, dapat dilaksanakan proyek pembangunan fasilitas pendidikan yang mencakup pengadaan fasilitas laboratorium dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun. Evaluasi proyek diperlukan untuk menilai kinerja dan dampak dari kegiatan tersebut.

4. Evaluasi Material

Untuk menjalankan kebijakan, program, atau proyek, dibutuhkan berbagai material atau produk tertentu. Misalnya, dalam pelaksanaan program pembelajaran matematika, buku teks matematika menjadi salah satu material yang esensial. Evaluasi terhadap material tersebut, seperti buku teks matematika, dilakukan untuk memastikan bahwa buku tersebut memenuhi standar tertentu yang meliputi kualitas isi, keterbacaan, ilustrasi, kertas, tipografi, penjiilidan, dan sebagainya.

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia

Evaluasi sumber daya manusia dilakukan untuk menilai kinerja anggota organisasi di berbagai lembaga. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kinerja SDM perlu dievaluasi secara berkala. Untuk mengembangkan potensi dan kinerja SDM, dilakukan program pengembangan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Program ini juga perlu dievaluasi untuk memastikan apakah berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan dari evaluasi suatu kegiatan adalah untuk mengetahui secara jelas apakah hasil yang dicapai, kemajuan yang diperoleh, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dapat dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kegiatan di masa depan. Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah suatu rencana kegiatan telah berhasil atau gagal. Proses ini secara konsisten mengkaji efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana yang ada. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengukur hasil dari pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan kriteria yang objektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Secara umum, tujuan utama dari evaluasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil, dimulai dari pengumpulan data yang terstruktur dan sistematis.

Kuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki desa yang dapat diukur dengan uang, serta segala hal yang dapat dianggap sebagai milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik berupa uang ataupun barang.

Sumber keuangan desa meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten atau kota, bagian dana perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota, anggaran alokasi dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau kota, serta hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pendapatan desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan berbagai kewenangan desa, seperti dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan. Pendapatan desa merujuk pada semua penerimaan desa dalam suatu anggaran yang sah dan tidak wajib untuk dikembalikan.

Kuangan desa yang berasal dari sumber pendapatan desa harus dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, diharapkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah terus mengalami peningkatan.

Pengelolaan keuangan desa mencakup empat tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa (Mahalika, Linda Loupatty, 2022).

1. Perencanaan

Perencanaan adalah langkah awal dalam merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di desa terkait. Pemerintah desa melakukan perencanaan guna mendukung pembangunan yang sesuai dengan kewenangan yang ada.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahapan untuk merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan. Pada tahap ini, kegiatan pembangunan desa dijalankan secara bertahap agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan untuk mengelola dan mengorganisir semua data serta dokumen terkait keuangan desa. Semua aktivitas yang telah dilaksanakan perlu dikelompokkan dan disusun dengan rapi untuk memudahkan proses pelaporan.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa adalah tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan. Setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan, laporan keuangan disusun dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa "keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa."

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa (BPKP, 2016). Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang dirancang agar mudah digunakan (user friendly), sehingga memudahkan pengoperasian oleh para pengguna. Proses penginputan dilakukan berdasarkan transaksi yang terjadi, dan akan menghasilkan berbagai output dalam bentuk dokumen penatausahaan serta laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti Dokumen Penatausahaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Bukti Penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Pajak, serta berbagai Laporan, termasuk Laporan Penganggaran (Perdes APBDes, RAB, APBDesa per sumber dana), Laporan Penatausahaan, Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Register.

Siskeudes hadir sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan berbasis aplikasi, Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi ini telah diterapkan secara bertahap di seluruh desa sejak tahun 2016, untuk membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor desa Harus dan desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok kajiannya secara rinci. Artinya penelitian dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan seperti dokumen dan arsip. Penarikan sumber data yang diambil melalui teknik purposive sampling berjumlah 9 orang untuk mendapatkan sampel data dengan menentukan informan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi menurut Kartono dalam Gunawan (2015:143) ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Wawancara menurut Moleong dalam Wahyuni dkk (2022:51) adalah suatu percakapan untuk mencapai maksud tertentu. Percakapan ini dicapai oleh pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberukan jawaban atas pertanyaan. Dokumentasi dalam artian umum merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

a. Kekuatan Penerapan

Kekuatan mengacu pada potensi atau kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, atau objek untuk melaksanakan suatu aktivitas secara efektif. Evaluasi terhadap penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Harus dan Desa Tantaringin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan kontribusi positif dalam hal pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini berhasil meningkatkan ketertiban dan transparansi pengelolaan. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, aplikasi ini meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pencatatan dan pengolahan data anggaran. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa aplikasi ini menyederhanakan penyusunan laporan dan membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur dan akurat sesuai standar yang berlaku.

Berdasarkan teori evaluasi oleh Eny Winaryati, dkk (2021:44-46), evaluasi konteks mengukur kekuatan pelaksanaan suatu kebijakan dengan mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa aplikasi SISKEUDES sesuai dengan kebutuhan perangkat desa dalam mengelola keuangan dan membuat laporan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi ini relevan dengan teori evaluasi konteks yang diajukan.

b. Kelemahan Penerapan

Kelemahan penerapan berkaitan dengan masalah atau kekurangan yang muncul selama penggunaan aplikasi, seperti masalah fasilitas atau teknis yang menghambat implementasi. Dalam hal ini, evaluasi penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Harus dan Desa Tantaringin menunjukkan adanya kelemahan signifikan. Aplikasi sering mengalami error dan respons yang lambat, yang menghambat proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Kendala teknis ini semakin diperburuk oleh koneksi internet yang tidak stabil, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses aplikasi.

Menurut teori evaluasi dari Eny Winaryati, dkk (2021: 44-46), untuk mengatasi kekurangan atau masalah tersebut, penting untuk menilai kelemahan pelaksanaan aplikasi.

Evaluasi konteks menekankan pada pentingnya menilai kesesuaian aplikasi atau kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa aplikasi SISKEUDES belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada, mengingat adanya masalah teknis yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori evaluasi konteks yang diharapkan.

2. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia terkait dengan faktor-faktor yang mendukung kesuksesan implementasi Aplikasi SISKEUDES di Desa Harus dan Desa Tantaringin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Perangkat desa memegang peranan krusial dalam kelancaran penerapan sistem ini. Tanpa kehadiran perangkat desa yang memadai, pelaksanaan aplikasi ini tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan Aplikasi SISKEUDES di kedua desa tersebut menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki pemahaman yang baik mengenai cara penggunaan aplikasi ini. Mereka telah memperoleh pengetahuan yang cukup untuk menjalankan aplikasi dengan efektif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Eny Winaryati, dkk (2021:44-46), menyatakan bahwa keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur dari sejauh mana kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan prosesnya. Temuan ini sejalan dengan teori tersebut.

b. Sarana dan Peralatan Pendukung

Untuk mendukung penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Harus dan Desa Tantaringin, sarana dan peralatan yang memadai sangat diperlukan. Sarana ini mencakup berbagai fasilitas atau perangkat yang digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi.

Evaluasi penerapan aplikasi di kedua desa ini menunjukkan bahwa sarana dan peralatan yang tersedia sudah cukup memadai. Penggunaan komputer, printer, serta koneksi internet yang ada terbukti dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan lancar.

Dalam penelitian ini, teori Eny Winaryati, dkk (2021:44-46) digunakan, yang menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan peralatan pendukung memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah evaluasi input yang berfokus pada rencana dan strategi mencapai tujuan.

3. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

a. Kegiatan yang Dilakukan

Kegiatan yang dilakukan merujuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini melibatkan interaksi, upaya, dan proses yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan aplikasi.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Harus dan Desa Tantaringin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, aktivitas yang dilakukan telah berjalan baik. Penerapan aplikasi ini telah berkontribusi positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Teori evaluasi menurut Eny Winaryati, dkk (2021:44-46) menyatakan bahwa dalam evaluasi proses, penting untuk mengamati kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah mendukung pelaksanaan keputusan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan seperti pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pembaruan data anggaran merupakan bagian penting dari evaluasi proses yang membantu pencapaian tujuan. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini sejalan dengan teori.

b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab adalah pihak yang memiliki kewajiban dalam memastikan suatu kegiatan atau keputusan berjalan sesuai rencana. Mereka bertugas mengatur dan memastikan keberhasilan pelaksanaan.

Pada evaluasi penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Harus dan Desa Tantaringin, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam penggunaan aplikasi ini. Melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa mereka memahami dengan baik peran mereka dalam operasionalisasi aplikasi ini.

Teori evaluasi dari Eny Winaryati, dkk (2021:44-46) mengungkapkan bahwa evaluasi proses berfokus pada penilaian sejauh mana tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang ada.

c. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan merujuk pada durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua aktivitas atau pekerjaan yang telah direncanakan.

Evaluasi terhadap waktu pelaksanaan di Desa Tantaringin menunjukkan hasil yang baik karena waktu yang diperlukan cukup efektif. Namun, hasil wawancara dan observasi di Desa Harus menunjukkan bahwa evaluasi mengenai waktu pelaksanaan masih kurang. Tidak ada evaluasi khusus terkait pengelolaan waktu dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES di desa ini.

Teori evaluasi menurut Eny Winaryati, dkk (2021:44-46) mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan penting untuk dievaluasi dalam menilai kelancaran dan efisiensi proses pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian di Desa Harus tidak sepenuhnya sesuai dengan teori evaluasi proses.

4. Evaluasi Produk (Product Evaluation)

a. Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan adalah proses evaluasi yang digunakan untuk menilai berbagai aspek penting kebijakan atau program, seperti efektivitas, efisiensi, dampak, dan relevansinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya serta apakah diperlukan perbaikan.

Berdasarkan evaluasi penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Harus dan Desa Tantaringin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, penilaian kebijakan dapat dianggap kurang baik. Hal ini karena meskipun kebijakan penggunaan Siskeudes di desa sudah diterapkan, masih ada kendala dalam pelaksanaannya, seperti sering terjadinya error pada server, yang menghambat kelancaran pengelolaan data keuangan desa. Selain itu, perangkat desa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah teknis yang muncul, terutama karena kurangnya dukungan teknis, baik dalam bentuk pendampingan langsung maupun bantuan jarak jauh.

Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi dari Eny Winaryati, dkk (2021:44-46), yang mengungkapkan bahwa evaluasi produk bertujuan untuk mengidentifikasi hasil yang telah dicapai. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori evaluasi produk.

b. Keberhasilan Pencapaian

Keberhasilan pencapaian merujuk pada sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai, apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam penerapan aplikasi. Ini melibatkan penilaian terhadap upaya dan hasil yang diraih.

Evaluasi terhadap keberhasilan pencapaian dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Harus dan Desa Tantaringin menunjukkan hasil yang cukup baik. Aplikasi Siskeudes telah membantu meningkatkan transparansi serta keteraturan dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis, aplikasi ini umumnya mempermudah aparat desa dalam mengelola keuangan desa dengan lebih efisien.

Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi menurut Eny Winaryati, dkk (2021:44-46), yang mengatakan bahwa evaluasi produk bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian telah mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada.



Faktor Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Penerpan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong (Sudi Kasus Desa Harus dan Desa Tantaringin)

1. Faktor Penghambat
 - a. Masalah Teknis pada Aplikasi
 - b. Keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi dan tidak menjadi prioritas
 - c. Tidak tersedia sistem atau prosedur yang jelas untuk mengatasi masalah atau kendala yang timbul selama pelaksanaan kebijakan.
2. Faktor Pendukung
 - a. Kemampuan Aparat Desa dalam menggunakan Siskeudes
 - b. Kepatuhan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

SIMPULAN

Evaluasi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Harus dan Desa Tantaringin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun ada beberapa tantangan. Dari sisi evaluasi konteks, aplikasi ini memberikan manfaat besar dalam peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan transparan, meskipun mengalami kendala teknis seperti error pada server dan koneksi internet yang tidak stabil yang memperlambat proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Evaluasi masukan menunjukkan bahwa perangkat desa sudah memiliki pemahaman yang cukup dalam penggunaan aplikasi ini, didukung dengan sarana yang memadai seperti perangkat komputer, printer, dan akses internet yang mendukung pengelolaan keuangan desa. Evaluasi proses menunjukkan bahwa penerapan aplikasi telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, meskipun waktu penerapannya di Desa Harus belum optimal karena belum adanya evaluasi terkait waktu pelaksanaan secara khusus. Dalam hal penanggung jawab, Kepala Desa dan Sekretaris Desa berperan aktif dalam memastikan kelancaran aplikasi, sedangkan penggunaan aplikasi di Desa Tantaringin sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan waktu. Evaluasi produk menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Siskeudes masih terkendala oleh masalah teknis yang menghambat kelancaran pengelolaan keuangan desa, di mana kurangnya dukungan pendampingan membuat aparat desa kesulitan mengatasi masalah ini. Meski begitu, keberhasilan pencapaian penerapan aplikasi ini masih cukup baik, karena telah berhasil meningkatkan transparansi dan keteraturan pengelolaan keuangan desa secara umum. Faktor pendorong penerapan aplikasi ini adalah kepatuhan pengguna dan upaya menjaga akuntabilitas, sementara faktor penghambat mencakup masalah teknis aplikasi, keterbatasan waktu, serta kurangnya prosedur yang jelas untuk menangani kendala yang muncul selama implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Loupatty, L. G. (2022). 'Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Di Kota Ambon'. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 544-557.

Affrian, Reno. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Dewi, R.K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Gunawan, I. (2015). *Meotode Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Hasan, M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Tahta Media Group



- Manab, H. A. (2014). *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia
- Wahyuni, Sri., dkk. (2022). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Winaryati, Eny, dkk (2021). *Model-Model Evaluasi, Aplikasi dan Kombinasinya*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Wirawan. (2016). *Evaluasi Teori, Model, Metodelogi, Standar, Aplikasi Dan profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.